

**EFEK JERA PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG
TIPIKOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Wulan Abidatul Khoiroh

NIM. 05010322023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Abidatul Khoiroh
NIM : 05010322023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Efek Jera Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dalam KUHP Nasional Dan Undang-Undang
Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2026

Yang menyatakan,



Wulan Abidatul Khoiroh
NIM. 05010322023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wulan Abidatul Khoiroh

NIM : 05010322023

Judul : Efek Jera Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam
KUHP Nasional Dan Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum
Pidana Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 05 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wulan Abidatul Khoiroh

NIM. : 05010322023

Judul : Efek Jera Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional Dan Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Moharomad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

Penguji III

Dr. Wahid Hadi Purnomo, M.H.

NIP. 197410252006041002

Penguji II

Dr. H. Prayo Handoko, S.S., S.H., M.Hum.

NIP. 196602122007011049

Penguji IV

Mega Ayu Ningtvas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 12 Maret 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Muftah Mufata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wulan Abidatul Khoiroh
NIM : 05010322023
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : wulanabdtl@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Efek Jera Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional Dan Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 April 2026

Penulis

(Wulan Abidatul Khoiroh)

ABSTRAK

Pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana yang telah disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti KUHP yang lama. Sejumlah ketentuan tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP lama dikodifikasi ke dalam KUHP yang baru. Salah satu ketentuan tindak pidana yang dicabut adalah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini menjadi pasal 603 KUHP Nasional. Dengan demikian munculnya konflik norma pada penelitian ini yaitu pada pasal 603 KUHP Nasional secara tertulis memang mengalami penurunan pidanaan mengenai batas minimal pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka dalam penelitian ini menjadikan rumusan masalah, 1) Bagaimana *Ratio Legis* pada Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor terhadap pelaku tindak pidana korupsi?, 2) Bagaimana pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam?.

Dalam penyusunan kepenulisan ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan teknik *library research* atau disebut dengan studi kepustakaan. Sumber yang didapatkan oleh penulis dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel, buku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Ratio legis pidanaan dalam Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berangkat dari arah kebijakan hukum pidana yang sama-sama mengadopsi teori pidanaan gabungan jika ditinjau melalui teori pidanaan, namun dengan penekanan bobot yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan penekanan pada sanksi berat yang lebih dominan mencerminkan pendekatan *retributif* untuk menimbulkan efek jera serta melindungi keuangan negara, sedangkan Pasal 603 KUHP Nasional disusun dalam kerangka kodifikasi hukum pidana yang lebih menekankan proporsionalitas dengan bobot *utilitarian* yang lebih kuat. Sehingga UU Tipikor tetap dianggap sebagai hukum pidana khusus dengan pidanaan yang lebih tegas untuk melindungi kepentingan publik dan keuangan negara. Dilihat dari hukum Islam korupsi dipandang sepadan dengan perbuatan *ghulūl*, *khiyānah*, dan *risywah* karena melibatkan penyalahgunaan amanah dan merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam pidanaan takzir, penerapan denda, pengembalian kerugian negara, serta pencabutan hak politik dipahami sebagai bentuk pidanaan yang sebanding untuk memberikan efek jera, dan menjaga harta.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penurunan pidanaan pada peraturan tindak pidana korupsi untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam terkait analisis pada implikasi kebijakan penurunan ancaman pidana dalam KUHP Nasional terhadap konsistensi pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas dan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	26
J. Sistematika Pembahasan	29
BAB II	31
KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	31

A.	Tinjauan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	31
1.	Efek Jera	32
2.	<i>Ratio Legis</i> Pemidanaan	34
3.	Tindak Pidana Korupsi	35
4.	Norma Hukum Terkait Dengan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	40
B.	Tinjauan Teori Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	47
1.	Teori <i>Retributif</i>	48
2.	Teori <i>Utilitarian</i>	50
3.	Teori Gabungan.....	52
C.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	54
1.	Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam	57
2.	Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam.....	64
BAB III	70
ANALISIS YURIDIS <i>RATIO LEGIS</i> PEMIDANAAN PADA PASAL 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN PASAL 603 KUHP NASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....		70
A.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	70
B.	Efek Jera dan <i>Ratio Legis</i> Pemidanaan Bagi Koruptor Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor.....	76
1.	Efek jera (<i>Deterrent Effect</i>) pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.....	77
2.	<i>Ratio legis</i> pemidanaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor	78
C.	Efek Jera dan <i>Ratio Legis</i> Pemidanaan Bagi Koruptor Pada Pasal 603 KUHP Nasional	79
1.	Efek jera (<i>Deterrent Effect</i>) pemidanaan dalam Pasal 603 KUHP Nasional	80
2.	<i>Ratio legis</i> pemidanaan dalam Pasal 603 KUHP Nasional.....	82
D.	Analisis yuridis perbandingan Efek Jera dan <i>Ratio Legis</i> Pemidanaan Bagi Koruptor Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor terhadap Pasal 603 KUHP Nasional	83

BAB IV	89
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	89
A. Pidanaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	89
B. Tinjauan Denda Sebagai Tujuan Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Jarimah Takzir	92
C. Analisis Yuridis Efek Jera Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif jarimah takzir	96
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	116
BIODATA PENULIS.....	127



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor dengan KUHP Nasional	84
Tabel 2 Mekanisme Denda dalam Pidanaan Korupsi	93
Tabel 3 Perbandingan antara pidana Indonesia dengan jarimah takzir (Hukum Islam).....	98



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amalia, Mia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, Hartawan Hartawan dan Abdul Rahman Upara. *Hukum Pidana (Asas-Asas, Teori, Dan Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Anwar, Syamsul, dkk. *Fiqh Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fajar, A. Malik. *Potret Hukum Pidana Islam, Analisis Perbandingan Dan Kritik Dalam Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi dan S.Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. 1983. Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, dan Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.

Hartanto. *Memahami Hukum Pidana*. Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, 2019.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Ilyas, Amir. *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori - Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam - Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori - Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas - Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Puspito, Nanang T., Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksmana B., Romie O. Bura, dan Aryo P. Wibowo. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2011.

Rahama Desmawati, Nabila Muzhiffarah, dan Lisa Ratnasari Dkk. *Dinamika Korupsi Di Indonesia*. Jawa tengah: Rumah Cinta, 2020.

Rifai, Eddy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar lampung: Justice publisher, 2014.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Romli Arsad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2014.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Revka Prima Media:Surabaya, 2022.

Sari, Seva Maya. *Fiqih Jinayah* (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori Dan Praktek)*. Kepel Press Yogyakarta, 2019.

Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. PT.Djava Sinar Perkasa, 2022.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama Yogyakarta, 2018.

Syauket, Amalia and Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Andri, Alsar, Askarmin Harun. “Kekuasaan dalam Pandangan Negara Konvensional dan Negara Islam.” *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam* 4, no. 1 (August 2019)

Anto, Fendi, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman Suratman, dan Moh. Muhibbin. “Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (September 2022).

Arifin, Arini Indika. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).

Aziz, M. Wahib. “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *International Journal Ihya’ ‘ulum al-Din* 18, no. 2 (2016): 170.

Badjuri, Achmad. “Peranan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption

Exterminate Commission in Indonesia).” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (March 2011).

Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 49.

Damayanti, Sulis Setya, dan Ayang Fristia Maulana. “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin).” *Jurnal Inovasi Hukum* 5, no. 4 (2024)

Dwi, Andin Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur - Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).

Edwar, Ahmad. “Hukuman Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh.” *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (February 2021).

Efendi, Sumardi. “Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (September 2024).

Fardha, Katrin Valencia. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Gaffar, Azis, Darliana, and Sapriadi. “Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023).

Harefa, Arianus. “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Education and Davelopment* 8, no. 1 (2020).

Hariyadi, Nazla Shafira, Ade Maman Suherman, dan Tri Setiady. “Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia.” *Action Research Literate* 9, no. 1 (January 2025)

Hawani, Sri. Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

- Helina, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Emilia Susanti. "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif Antara Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Causa: Jurnal Hukum Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2025).
- Ilham, Muhammad Zawil, Liza Agnesta Krisna, dan Andi Rachmad. "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 1 (2024).
- Ismail, Muhammad, Aulia Tri Olivia, dan Fahri Albar Harahap. "Efek Jera Sebagai Tujuan Hukuman Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal sahabat*, 2024.
- Izaturahmi, Fiddini, Winda Sugiarti, Wisyanto, Shafiah, and Melisa Putri. "Konsep Hudud Dalam Al-Quran." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024).
- Julio, Christopher Elia, dan Abdul Kholiq. "Juridical Analysis Changes Number Minimum and Maximum Sanctions Corruption Against Justice and Legal Certainty." *Law Development Journal* 7, no. 3 (2025): 507–8.
- Kadir, Muh. Awaluddin, Muh Shuhufi. "Efek Jera Pemidanaan Dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia". juni 2024, vol. 1, no. 11 (July 2024): 486.
- Kadir, Zul Khaidir. "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (May 2025): 6–7.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014).
- Karubun, Sisca Carolina. "Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 4 (2025): 4366.

- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. "Qishas Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (December 2022).
- Mahfudh, Nur Iqbal. "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi." *IN RIGHT: Jurnal Agama da Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 254.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, dan Abas Mansur Tamam. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 57.
- Meidiantama, Refi, dan Donna Exsanti Charinda. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 3, no. 1 (May 2025).
- Mubaraq, Muhammad Husni. "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (October 2022).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 2023): 227.
- Munawar, Said. "Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (March 2025): 8.
- Mutiara, Riva, Aprilia Yoshinta Putri, dan Muhammad Rivian Viawan. "Ta'zir and Restorative Justice: Alternative Punishments from an Islamic Perspective." *Balada Al Mubaarok* 1, no. 1 (2025): 64.
- Nada, Islamilatun, Beta Mazroatul Iلمي, Lucky Dwi Ardiyanti, dan Rosa Octafiana. "Menelaah Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Pasal Lama Dan Pasal Baru." *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024): 131.
- Najib, Mohammad. "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Corruption And Ta'zir In Perspective Of The Islamic Criminal Law." *Jurnal Ulum Al-Qur'an* 1, no. 1 (2014): 82.

- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (May 2024): 226–27.
- Nurjaman, Umar, Mukhlis, Subhan Z, dan Neneng Nurhasanah. "Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (December 2023): 157.
- Oktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (March 2017): 26–37.
- Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review*, Februari 2019, vol. 1, no. 1 (2019)
- Pradika, Dwi Helmi, dan Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Jurnal* 11, no. 2 (2022): 6–9.
- Pritasari, Amanda Dea. "Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah." (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024): 3.
- Putra, Muhammad Axel, dan Ade Adhari. "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4821.
- Putri, Andiani Trialika, Enjang Rohiman, dan Faisal Ahmad Maulana. "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam." 1, no. 2 (2023): 6.

- Rahman, Fathor. "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025." *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (2024): 49.
- Ramadhan, Hilal Arya, dan Fauzah Nur Aksa. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH* 4, no. 2 (2021): 25.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 182.
- Rudiyanto. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Pasal 8, Pasal 9, Dan Pasal 10 Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, 2018).
- Saputri, Berliana Ayu, Dominikus Rato, dan R.A Rini Anggraini. "Ratio Legis Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 11 (2024).
- Shulhiya, Izzatu. "Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan." (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).
- Sitepu, Esra Natasya Br, Ivana Theo Philia, Jekson Saragih, Manotar Sinaga, Muthiah Latifah, dan Delva Fitria. "Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 157.
- Sitompul, Rahul Kristian, dan Hudy Yusuf. "Efek Jera Narapidana (Prisoner Deterrent Effect)." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (Mei 2024): h. 1928.
- Situmorang, Nelly Esterina, dan Aan Asphianto. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum." *MATAKAO Corruption Law Review* 3, no. 1 (2023): 4.

- Sofyanoor, Andin. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 2 (January 2022): 21.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (December 2022): 222.
- Sumarwoto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Rechstaat: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA* 8, no. 1 (March 2014): 2.
- Suroya, Zahrotus, dan Pudji Astuti. "Pengurangan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *E-Journal Unesa* 11, no. 4 (2024): 500.
- Sutamaya, Agus Gede, Yudi Kurniawan, dan Neneng Nurhasanah. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 1 (June 2022): 69.
- Syafruddin. "Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2787.
- Syarifah, Khilyatin Nimatus. "Analisis Masalah Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 Dan 604 RKUHP Tahun 2019 ." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 2018): 129–32.
- Triyanto, Gatot. "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtens* 6, no. 1 (2017).
- Valerian, Dion. "Meretas Konsep Baru Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2 (2019)

Winatalia, Purisa Cristiwi. "Analisis Dampak Korupsi Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 12 (2025): 1–2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah Akademik RUU KUHP

D. Data Elektronik

Anissa Larasati. "Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Perkembangannya." *Marinews*, September 3, 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-pengaturan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-0x8?utm_source.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A